

*Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalbar memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pelaksanaan APBD Kalbar 2011. Bahkan BPK menilai SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar tidak terlalu serius untuk menyelesaikan persoalan aset.*

**Andry**  
Borneo Tribune, Pontianak

"Saya melihat bahwa SKPD tidak terlalu serius untuk menyelesaikan persoalan aset. Waktu tahun lalu dan waktu menyampaikan laporan khusus mengenai aset. Saya sudah menyampaikan bahwa tolong segera dibentuk action red atau dibentuk ekpos untuk penyelesaian aset. Karena persoalan aset masih mengganjal," tegas anggota BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, H. DR. Rizal Djalil, usai menyerahkan LHP terhadap pelaksanaan APBD Kalbar 2011, pada paripurna istimewa di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (5/7).

■ Predikat WDP

# Cornelis Minta Selesaikan Masalah Aset



LHP, anggota BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, H. DR. Rizal Djalil, didampingi Gubernur Cornelis usai menyerahkan LHP terhadap pelaksanaan APBD Kalbar 2011 pada paripurna istimewa di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (5/7). FOTO: Andry/Borneo Tribune

## Cornelis Minta Selesaikan Masalah Aset

Menurut Rizal Djalil, seandainya kemarin persoalan aset sudah bisa diselesaikan, meskipun belum seratus persen. Misalnya 85 atau 60 persen saja, maka pihaknya bisa memberikan LHP secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Ya mungkin tidak usah semuanya, paling 85 atau 60 persen, maka sudah WTP. Tapi yang itu tadi. Jadi ini bukan kesalahan Pak Gubernur. Gubernur itu kepala daerah. Tugasnya menemui Presiden, membuat kebijakan dan lain sebagainya." BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar melihat bahwa SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar tidak terlalu serius untuk menyelesaikan persoalan aset.

"Okelah kalau ada kesibukan lain, katanya sering diundang atau sering dipanggil, kan bisa dibentuk tim khusus. Misalnya saja sertifikat. Apa sih susahnya mengurus sertifikat. Wong kita juga mengurus sertifikat rumah sendiri. Jadi ini tergantung nawaitunya. Nah saya berharap Pak Gubernur supaya lebih tegas kepada semua SKPD. Kalau memang kira-kira tidak visible dan tidak berprestasi, silahkan dilakukan penyegaran. Karena apa, ini

tugas negara. Itu resepnya," ujarnya bernada datar.

Tak hanya itu, BPK RI juga menyampaikan ada persoalan terkait dengan kesalahan anggaran. Menurutnya, kesalahan anggaran itu tidak murni merupakan kesalahan SKPD saja, melainkan dewan juga perlu melakukan koreksi. "Oleh karena itu, jangan mencari siapa yang salah. Mari duduk sama-sama, undang Kementerian Keuangan, undang BPKP dan undang BPK untuk meluruskan hal itu," ucapnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait rencana DPRD Kalbar untuk membentuk Pansus aset, Rizal Djalil berpendapat, sebenarnya DPRD Kalbar tidak perlu membentuk Pansus aset. Melainkan, kata dia, cukup dilakukan pemanggilan terhadap kepala Bappeda, kepala biro keuangan untuk menyelesaikan hal tersebut dan dibuat list permasalahannya untuk segera diperbaiki.

"Supaya DPRD bisa lebih fokus memikirkan aspek legislasi dan bugget yang akan datang. Apalagi sebentar lagi kan harus mengurus APBD-P. Paling tidak mereka bisa memikirkan kepentingan rakyat yang lebih

luas," paparnya.

Sementara itu, Gubernur Cornelis menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh BPK RI harus segera ditindaklanjuti. "Ya kalau kita hanya tinggal perintah kerja. Dan kita lihat apakah mereka (SKPD, red) bisa menyelesaikannya," ujar Gubernur Cornelis.

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar apabila kabinetnya tidak dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kalau memang tidak selesai-selesai, mau tidak mau, evaluasi akan dilakukan. Apalagi hal ini batas waktunya ditentukan."

Saat disinggung apa pendapatnya terkait penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh BPK RI, Gubernur menjawab, "Karena kesalahannya tidak terlalu prinsip, hanya mencatat serta mengumpulkan harta kekayaan yang tidak dilakukan, saya sebenarnya sangat kesal. Padahal itu sebenarnya tidak terlalu sulit," sesal Cornelis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie, menambahkan persoalan aset

tidak perlu diselesaikan dengan membentuk Pansus, melainkan cukup dengan melakukan pemetaan terkait persoalan aset tersebut. Mulai dari pemetaan aset secara teknis, administratif dan politis.

"Karena persoalan aset ini ada tiga kategori. Ada aset yang bisa diselesaikan secara teknis, ada aset yang diselesaikan secara administratif dan ada aset yang bisa diselesaikan secara politis. Dan yang terjadi saat ini, semua aspek ada," ucap Sekda.

Terkait kekesalan Gubernur terkait penilaian WDP yang diberikan oleh BPK RI terhadap pelaksanaan APBD Kalbar 2011, Sekda menjawab, "Gubernur itu adalah seorang pemimpin, jadi dia nggak mungkin kesal. Dia tahu bahwa ini prosesnya panjang dan memakan waktu. Dan kita perlu menyelesaikan secara bertahap. Supaya kita tidak mendapatkan WTP yang akarnya tidak kuat. Kita ingin mendapatkan WTP dengan pondasi yang kokoh. Kalau cuma mau merebut WTP, kita tahun lalu juga bisa, kalau cuma mau merebut. Tapi kita nggak mau, tahun depan turun lagi," tandasnya.